



# Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

■ Cornelis Berharap Opini WTP di Kalbar Bertambah

“ Pada era reformasi dan demokrasi, kesadahan masyarakat untuk menuntut agar keuangan Negara dikelola secara akuntabel dan transparan semakin meningkat. Karena itu, BPK sesuai dengan rencana strategisnya mengawal agar pengelolaan keuangan Negara mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

**Borneo Tribune, Pontianak**  
 Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, serta memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta pencapaian kinerja BPK RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK RI menyelenggarakan seminar dengan tema "Peran BPK dan DPR dalam Mengawal Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan



Suasana seminar di Hotel Mercure Pontianak. Foto: Hawad Sriyanto/Borneo Tribune.

....Ke Halaman - 11.





## Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Negara" pada Jumat (8/11), di Hotel Mercure Pontianak.

Acara yang dilaksanakan ini bertujuan untuk membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan BPK RI dari entitas diperiksa, serta memperoleh masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BPK RI.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri dan Anggota DPR RI Kamaruddin Sjam.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar, Cornelis memberikan apresiasi kepada BPK RI yang memilih Kalbar menjadi salah satu tempat kegiatan sosialisasi yang sangat penting bagi birokrat yang bersentuhan

dengan aktivitas pelaporan keuangan.

"Saya memberikan apresiasi kepada BPK yang dapat menggelar seminar ini di Kalbar. Tidak mudah menghadirkan Wakil BPK RI, langsung ini ke Kalbar. Tapi, syukur hari ini bisa bersama kita dan saya mohon kepada peserta dapat memanfaatkan seminar ini untuk menyampaikan permasalahannya," jelas Cornelis.

Lanjut orang nomor satu di Kalbar ini, perbaikan demi perbaikan terkait dengan pelaporan keuangan mesti dilakukan. "Karena itu, jika ada pemeriksaan oleh BPK, jangan sampai kepala satuan kerjanya justru tidak ditempat. Itu keliru, karena ada hal yang perlu dijelaskan kepada tim auditor BPK, untuk mengambil keputusan. Jangan sampai, laporan sudah dibuat, ada temuan lalu "menggelepar", nah dalam seminar ini jika ada masalah silahkan

gunakan moment ini untuk itu. Diharapkan opini WTP makin banyak di Kalbar," pinta Cornelis.

Sementara itu, Wakil ketua BPK RI, Hasan Bisri memaparkan peran BPK mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara, antara lain menjelaskan mengenai tugas pemeriksaan BPK RI berdasarkan peraturannya dan perundangan, pemeriksaan BPK RI sebagai suatu kebutuhan dan hasilnya bersifat final dan mengikat, kewajiban entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan serta peraturan dan mekanisme pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

"Jadi pemeriksaan BPK itu bukan mencari-cari kesalahan, namun mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar," tegasnya.

Sedangkan Anggota DPR RI, Kamaruddin Sjam, dalam

paparnya menjelaskan mengenai peran DPR RI dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu pengawasan yang dilakukan DPR RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta tata cara pengawasan yang dilakukan DPR RI.

Dari sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, LSM, Badan Kemahasiswaan dan Pers ini diharapkan dapat meningkatkan mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan para pemangku kepentingan serta meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara akuntabel dan transparan. (haes) □